

PENERAPAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI WADAH PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA STKIP CITRA BAKTI YANG ANTI KORUPTIF

Prisko Yanuarius Djawaria Pare¹⁾ Ferdinandus raga²⁾, Ignasius Lodo³⁾, Maria Sintia Ciak⁴⁾, Maria Jesinta Meo⁵⁾, Aurelia Lopez⁶⁾,

Program Studi Pendidikan IPA, STKIP Citra Bakti

email:¹⁾ priskodjawaria@gmail.com, ²⁾ ferdinandusraga89@gmail.com,
³⁾ ignasiuslodo0@gmail.com, ⁴⁾ cindiciak043@gmail.com, ⁵⁾ bayjessyg@mail.com,
⁶⁾ kelitika094@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi ilmiah dan pengembangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan materi pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah insersi dan juga untuk mewujudkan pembentukan karakter dasar mahasiswa STKIP Citra Bakti yang anti koruptif. Juga sebagai wadah edukasi terhadap nilai-nilai anti koruptif dalam diri mahasiswa sebagai kaum intelektual dan generasi penerus bangsa. Pembelajaran pendidikan anti koruptif menjadi sangat penting dan urgen untuk di terapkan di setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Tentunya yang mendasari latarbelakang ini adalah adanya kesepakatan kerjasama antara kementrian pendidikan dan kebudayaan riset , teknologi dan pendidikan tinggi bersama dengan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia tentang penerapan pembelajaran pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dalam kajian kepustakaan yang dilakukan dapat di tentukan empat model pendekatan pembelajaran pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diantaranya: (1) pendekatan pengacara (*lawyer approach*), (2). Pendekatan bisnis, (3). Pendekatan budaya (*culture approach*), dan (4). Pendekatan bisnis (*economic approach*). Dengan 4 pendekatan ini, maka dapat di cari benang merah yang cocok agar strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dapat berhasil untuk diterapkan di perguruan tinggi dalam upaya membentuk kepribadian anti koruptif pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan masyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Kata kunci: pendidikan anti korupsi, karakter, mahasiswa

Abstrac

This research is scientific description and development research. The aim of this research is to apply anti-corruption educational material as an insertion course and also to create the basic anti-corruption character formation of STKIP Citra Bakti students. Also as a forum for education regarding anti-corruption values in students as intellectuals and the nation's next generation. Learning about anti-corruption education is very important and urgent to be implemented at every level of education, from primary education to secondary education. Of course, what underlies this background is the existence of a cooperation agreement between the ministries of education and research, culture, technology and higher education together with the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia regarding the implementation of anti-corruption educational learning in the higher education curriculum. In the literature review

carried out, four models of learning approaches to anti-corruption education in higher education can be found, including: (1) the lawyer approach, (2). Business approach, (3). Cultural approach, and (4). Business approach (economic approach). With these 4 approaches, we can find a suitable common thread so that anti-corruption education learning strategies can be successfully implemented in higher education in an effort to form an anti-corrupt personality in students and build their enthusiasm and competence as agents of change for the life of a clean society and state. and free from the threat of corruption.

Key words: anti-corruption education, character, students

PENDAHULUAN

Pendidikan dilaksanakan untuk membangun kesadaran, pemahaman, sikap, dan perilaku antikorupsi, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen dan senantiasa berupaya menanamkan pendidikan antikorupsi kepada seluruh peserta didik, mulai dari jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, tinggi, hingga masyarakat umum. Penyusunan buku panduan ini merupakan upaya KPK untuk menyediakan bahan pembelajaran antikorupsi bagi mahasiswa. Sebagai bentuk penerapan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, KPK bersama mitra pemangku kepentingan juga melakukan inovasi dan pengembangan bahan pembelajaran lain berupa komik, buku saku, film, dan papan permainan (boardgame) sehingga media ajar pembelajaran antikorupsi jadi lebih menarik dan variatif.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi – yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan – tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa –sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan– diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih

difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Untuk keperluan perkuliahan dipandang perlu untuk membuat sebuah Buku Ajar yang berisikan materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengembangan ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan strategi edukasi bagi mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada dalam proses pembentukan karakter yang anti koruptif, jujur, transparan dan akuntabel terhadap proses pencegahan benih-benih korupsi yang bakal timbul, tumbuh dan hidup di kampus STKIP Citra Bakti Ngada. Strategi yang dikembangkan adalah metode pembelajaran dan studi kasus yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa di kelompokkan di dalam kelas kemudian dosen memberikan kajian teoritis terkait seluk-beluk tindak pidana korupsi, faktor penyebab, dan akibat yang di timbulkan. Setelah itu metode yang kedua adalah mahasiswa di arahkan untuk melakukan kajian ilmiah terhadap kasus-kasus yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi dengan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Data dikumpulkan dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa untuk mengetahui sampai sejauh mana target pencapaian pembelajaran pendidikan anti korupsi selama satu semester dan mahasiswa diberikan kewajiban untuk membuat refleksi hidup terkait budaya korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejauh gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan (Wijayanto, 2010) yaitu: 1. Pendekatan Pengacara (Lawyer approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (quick impact) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (high costly), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum

(kepolisian dan pengadilan) itu sendiri. 2. Pendekatan Bisnis (Business approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-Korupsi 4 Bagian I. Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-korupsi 3. Pendekatan Pasar atau Ekonomi (Market or Economist approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. 4. Pendekatan Budaya (Cultural approach) Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap antikorupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (low costly), namun hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting).

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (petty corruption) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil. Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (cultural approach) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersamasama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Pembahasan

Efektifitas pembelajaran materi pendidikan anti korupsi di STKIP Citra Bakti baru di berlakukan 3 tahun terakhir ini dengan menjadikan pendidikan anti korupsi menjadi mata kuliah insersi yang di masukan ke dalam mata kuliah pendidikan karakter, pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Setelah di kaji letak pentingnya materi ini maka di insersi ke dalam mata kuliah pendidikan karakter sejalan dengan langkah perwujudan pembentukan karakter mahasiswa yang anti koruptif, yang bersih, akuntabel serta besikap jujur sesuai nilai-nilai anti koruptif. Dalam pembelajaran di kelas mahasiswa di berikan pemahaman terkait empat pendekatan pembelajaran anti koruptif. Juga perpektif-perspektif yang diklaim sebagai pendekatan pencegahan tindakan

korupsi diantaranya: 1 Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum. 2 Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (grand corruption) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah fakultas Ilmu Politik. 3 Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Sosiologi Korupsi di sejumlah program studi Sosiologi atau Fakultas Ilmu Sosial. 4 Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (petty corruption), apalagi korupsi besar (grand corruption). Perspektif ini kemudian melahirkan antara lain matakuliah Korupsi dan Agama pada sejumlah Fakultas Falsafah dan Agama. 5 Beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah matakuliah.

1. Konsep-konsep pembelajaran

Internalisasi Pembelajaran Integritas Internalisasi nilai-nilai integritas dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan 4 hal (Budiningsih : 2004) yaitu: a. pengertian atau pemahaman terhadap karakter integritas, b. perasaan integritas, c. tindakan integritas, d. internalisasi nilai-nilai (nilai-nilai keimanan, nilai etika, nilai moral) Ke-empat komponen tersebut telah mencakup domain kognitif, afektif dan psikomotorik yang dicapai melalui materi dan metode pembelajaran yang tepat.

2. Intensi Perilaku Anti-Korupsi Pada dasarnya korupsi merupakan perilaku yang dimunculkan oleh individu secara sadar dan disengaja. Secara psikologis terdapat beberapa komponen yang menyebabkan perilaku tersebut muncul. Setiap perilaku yang dilakukan secara sadar berasal dari potensi perilaku (perilaku yang belum terwujud secara nyata), yang diistilahkan dengan intensi (Wade dan Tavis: 2007). Potensi intensi perilaku tersebut adalah sikap, yang terdiri dari tiga faktor yaitu kognisi, afeksi dan psikomotor, di mana ketiganya bersinergi membentuk suatu perilaku tertentu (Azwar: 2006). Dengan demikian, perilaku korupsi/anti-korupsi yang 7 Bagian I. Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti-korupsi behavioral beliefs berupa perasaan positif Attitude Toward behavior berupa perasaan positif Kecenderungan tinggi berperilaku anti-korupsi Gambar 1.1. Pengaruh ATB terhadap intensi perilaku anti-korupsi dimunculkan oleh individu didasari oleh adanya intensi perilaku korupsi/anti-korupsi yang didalamnya terjadi sinergi tiga faktor kognisi, afeksi dan psikomotorik. Metode matakuliah anti-korupsi hendaknya memberikan sinergi yang seimbang antara ketiga komponen tersebut, sehingga benar-benar dapat berfungsi untuk memperkuat potensi

perilaku anti-korupsi mahasiswa. Pada dasarnya potensi anti-korupsi ada pada diri setiap individu mahasiswa, dan adalah tugas dosen untuk memperkuatnya.

Teori planned behavior (Fishbein dan Ajzen: 1975) Masih terkait dengan intensi perilaku anti-korupsi, terdapat 3 (tiga) komponen utama pembentuk intensi perilaku yaitu (Fishbein dan Ajzen: 1975): a. Attitude toward behavior (ATB): yang dipengaruhi oleh behavioral belief, yaitu evaluasi positif ataupun negatif terhadap suatu perilaku tertentu - tercermin dalam kata-kata seperti, benar-salah, setuju-tidak setuju, baik-buruk, dll. Evaluasi negatif terhadap perilaku korupsi dan

evaluasi positif terhadap antikorupsi akan meningkatkan intensi (potensi) untuk berperilaku anti-korupsi. b. Subjective norms (SN): yang dipengaruhi oleh subjective norms di sekeliling individu yang mengharapkan si individu sebaiknya berperilaku tertentu atau tidak. Misal norma agama (bagi individu beragama), norma sosial, norma keluarga, atau ketika orang-orang yang penting bagi individu atau cenderung dipatuhi oleh individu menganggap perilaku anti-korupsi sebagai hal positif, maka akan meningkatkan intensi (potensi) berperilaku anti-korupsi. c. Control belief (CB): yang dipengaruhi oleh perceived behavior control, yaitu acuan kesulitan dan kemudahan untuk memunculkan suatu perilaku. Ini berkaitan dengan sumber dan kesempatan untuk mewujudkan perilaku tersebut. Misalnya lingkungan disekeliling individu yang korup atau kesempatan korupsi yang besar/mudah akan meningkatkan intensi individu untuk melakukan perilaku korupsi, dan sebaliknya

4. Konsep Pembelajaran Berpusat Siswa/Student-centered Learning SCL merupakan orientasi baru pendidikan yang dianggap lebih tepat dalam membentuk kompetensi utuh siswa. Konsep SCL adalah sebagai berikut (Utomo Dananjaya: 2010): a. Pembelajaran merupakan proses aktif mahasiswa yang mengembangkan potensi dirinya. b. Pengalaman aktif mahasiswa harus bersumber/relevan realitas sosial, masalah-masalah yang berkaitan profesi, berkaitan masalah-masalah sosial seperti pelayanan umum, dll. c. Di dalam proses pengalaman ini mahasiswa memperoleh inspirasi dan termotivasi utk bebas berprakarsa, kreatif dan mandiri d. Pengalaman proses pembelajaran merupakan aktifitas mengingat, menyimpan dan memproduksi informasi, gagasan-gagasan yang memperkaya kemampuan dan karakter mahasiswa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran pendidikan anti korupsi sebagai wadah pembentukan karakter mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan atau metode serta konsep-konsep pembelajaran yang dapat mewujudkan karakter mahasiswa yang bersih, jujur, disiplin, kerja keras, setia, dan tranparan. Pendekatan pembelajaran yang dimaksud merupakan cara yang paling jitu dalam memberikan aktifitas pembelajaran yang menyenangkan bagi mahasiswa dalam mewujudkan kepribadian dan akhlak, moral, dan etika mereka agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mencabut akan utama korupsi di indonesia dan mengubur budaya korupsi yang selama ini telah menjadi kebiasaan yang dilazimkan.

Saran

Mahasiswa diharapkan dan diarahkan agar mampu melawan arus globalisasi yang datang silih berganti mengerogiti keutuhan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Mahasiswa diharapkan serta diberikan tugas dan tanggungjawab besar dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara dari virus korupsi yang telah meresahkan rakyat, yang telah menghancurkan perekonomian negara dan keuangan negara. juga

DAFTAR RUJUKAN

- BAPPENAS RI, (2002), Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat, Jakarta: Bappenas RI
- Harmin, (2011), Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab, artikel dari harmin-newworld. blogspot.com
- Kurniawan, (2010), Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya, Jakarta.
- Prasojo, Eko (2005), Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Siswandi, (2009), Mengembangkan Disiplin Siswa, artikel dari www.nazwadzulfa.wordpress.com.
- Puspito. T nanang, dkk. 2011. Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Sjaifudin, H. (2002), Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance, Jakarta.
- Supardi, E. (2004), Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri, Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional.